

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik mempengaruhi sistem politik suatu negara yang demokratis karena sistem politik demokratis tidak ada artinya tanpa partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk pemilihan langsung atau tidak langsung para pemimpin negara yang mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut. Partisipasi politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan masyarakat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingannya. (Regina Singestecia, dkk, 2018 : 63 - 72)

Kesadaran berpartisipasi dalam politik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi publik serta menggerakkan suatu sistem demokrasi lebih baik di masa depan. Partisipasi politik masyarakat adalah bentuk negara demokrasi. Partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang dapat menyampaikan pendapat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pertimbangan dalam pelaksanaan politik. Kesadaran tersebut tidak dapat lepas dari pendidikan khususnya pendidikan politik yang berperan sangat penting dalam pemahaman para pemilih tentang aktivisme partisipatif. (Funny W Mukti, 2022 : 94-95)

Bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk berpartisipasi dalam proses output

dan input politik selanjutnya partisipasi pasif adalah kegiatan yang memfokuskan pada proses output. Ada juga masyarakat yang tidak termasuk dalam partisipasi aktif ataupun pasif karena masyarakat dan sistem politik berbeda dengan yang diperjuangkan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang mengarahkan partisipasi politiknya memiliki alasan dan pendapat lain, akhirnya menempatkan dirinya dalam kelompok partisipasi politik tersebut.

M. J. Herskovits mengatakan masyarakat merupakan sekelompok individu terorganisir yang mengikuti cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia terbesar yang mempunyai adat istiadat, kebiasaan, sikap, tradisi dan rasa persatuan. S.R. Steinmetz mendefinisikan bahwa masyarakat diberikan batasan mengenai kelompok manusia terbesar seperti kelompok manusia lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.

Pendapat dari *MacIver* yang mengatakan masyarakat adalah suatu sistem cara kerja dari kekuasaan dan saling membantu antara kelompok dan pembagian sosial lainnya seperti sistem pengamatan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah atau jaringan relasi sosial. Contoh yang dapat dilakukan dalam partisipasi politik adalah komunikasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, dapat dikatakan bahwa seseorang dengan afiliasi politik yang lebih luas mewakili anggota parlemen terpilih dalam pemilihan parlemen. Tentu saja, bentuk partisipasi politik yang paling kecil pun mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 yaitu 273,52 juta jiwa. Dilihat bahwa di Indonesia memiliki banyak masyarakat yang harus ikut dalam berpartisipasi politik untuk mencapai tujuan bersama yang baik di masa depan. Nyatanya menunjukkan bahwa kegiatan politik warga selalu bergerak dari nonpartisipasi, partisipasi terbatas menuju kegiatan politik penuh. Orang yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik sama sekali memiliki sikap tidak peduli atau apatis karena beberapa alasan misalnya tidak tertarik pada politik, tidak memahami isu-isu politik, atau tidak yakin upaya mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil. (Anwar Arifin, 2015 : 79)

Menurut pendapat beberapa ahli ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi politik yaitu adanya status sosial dan ekonomi dimana masyarakat dilihat dari garis keturunan, pekerjaan dan pendidikan. Adapun kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan karena seseorang dengan posisi sosial yang tinggi membutuhkan minat tentang politik, pengalaman menjalankan organisasi, kesadaran politik, kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang lingkungan sosial politik. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah. Pemerintah dapat dipercaya atau tidak, dipengaruhi oleh tidak baiknya pemerintahan dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan pemerintahan yang dipimpin. Masyarakat dapat mendorong partisipasi tersebut melalui media sosial dan diskusi informal kepada

pemerintahan. (Sahran Raden, dkk, 2019 : 21-22)

Ada beberapa bentuk partisipasi politik masyarakat 8 ulu yaitu pertama, adanya voting atau pemberian suara biasanya dilakukan dalam pemilihan umum. Kedua, *direct contact* atau kontak langsung bersifat pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi dan disebut partisipasi politik rendah. Ketiga, *protes activity* atau kegiatan protes partisipasi ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang tertentu. Bentuk partisipasi ini berupa aksi demo atau bahkan anarkis dan sudah termasuk kategori tingkat tinggi karena yang melakukan kegiatan hanya beberapa orang atau kelompok saja untuk mendapatkan keadilan.

Realitasnya masyarakat di Indonesia ini mengalami kesulitan karena ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang diturunkan seperti kenaikan bahan bakar minyak dan bantuan pemerintah atau bantuan tunai langsung (blt) yang mereka menganggap bahwa kebijakan ini tidak adil. Masyarakat sendiri terpukul dan menderita dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, tetapi masyarakat juga terkadang kebanyakan memiliki sikap tidak peduli atau apatis terhadap kegiatan politik dan mengabaikan tentang kebijakan publik tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi sikap partisipasi politik masyarakat di kelurahan 8 Ulu kecamatan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan dalam menyikapi kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah seperti yang diteliti pada penelitian ini yaitu naiknya harga bbm pada tahun 2022 dan bantuan tunai langsung (blt) di Indonesia. Kelurahan 8

ulu saya jadikan objek penelitian dikarenakan lokasi merasakan dampaknya seperti kenaikan bahan bakar minyak dan bantuan tunai langsung yang tidak pernah mendapatkannya. Sebenarnya banyak juga masyarakat yang terdampak tetapi saya lebih memfokuskan di lingkungan saya terlebih dahulu. Saya juga belum pernah menemukan penelitian lokasi di kelurahan 8 ulu.

Adanya kenaikan bbm banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang tersebut untuk berjualan bahan bakar motor. Banyak warga membeli bahan bakar motor di pinggir jalan (eceran) karena di spbu mengalami antrean panjang dan menyebabkan banyak pengendara motor yang terburu-buru pada akhirnya tidak mengisi bbm di spbu. Para sopir baik sopir truk dan bus umum sangat kesulitan mendapatkan bbm berupa solar dikarenakan sering kosong dan banyaknya orang mengantri itu juga disebabkan karena stok solar hanya sedikit seperti beberapa narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu seorang sopir bus kota Indralaya – Palembang bapak Jul

Seringkali ada oknum yang berbuat curang dengan membuat plat nomor kendaraan palsu untuk mengisi bahan bakar dan dijual kembali atau dijadikan stok sedangkan orang yang mempunyai plat nomor kendaraan asli tidak bisa mengisi bahan bakar minyak tersebut karena telah digunakan oleh orang lain. Adapun bahan bakar minyak yang datang dari daerah jambi yang tidak memiliki izin resmi tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah untuk

dijual-belikan di Palembang, menyebabkan para sopir bus umum yang menggunakan bbm berupa solar kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Pada akhirnya membuat mereka melakukan aksi demo untuk meminta keadilan dan solusi bagi mereka agar bisa mendapatkan bbm dengan mudah dan bekerja seperti biasa.

Terlihat sekarang ini dengan naiknya bahan bakar antrean di spbu semakin banyak dan menyulitkan masyarakat, berbanding terbalik dengan yang diharapkan yaitu memudahkan masyarakat untuk membeli bahan bakar. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang partisipasi dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, apakah masyarakat ikut serta dalam kebijakan pemerintah atau sekedar mengalah dan mengikuti keputusan pemerintah tanpa mengeluarkan pendapatnya karena negara kita adalah negara demokrasi. Peneliti ingin mengetahui dan mempelajari partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah setiap keputusan harus adil dan tidak boleh merugikan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan peneliti di atas, mulai dari kondisi pemerintah saat ini hingga masalah kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebijakan lain yang membuat hidup masyarakat semakin sulit secara finansial maka, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah warga 8 ulu Kecamatan Jakabaring dan membahas bagaimana pendapat warga 8 ulu Kecamatan Jakabaring tentang kebijakan pemerintah di Indonesia yang tidak tepat ini, terlepas dari apakah mereka partisipasi dalam kebijakan yang dipaksakan pemerintah seperti demonstrasi atau bahkan tidak peduli. Hal ini terkait

dengan kebijakan pemerintah karena sebagian besar masyarakat saat ini hanya diam saja dan mengikuti sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang peneliti sangat tertarik dengan permasalahan-permasalahan kebijakan pemerintah sekarang ini seperti bantuan tunai langsung dan bahan bakar minyak naik yang biasa ditemukan di masyarakat begitupun di kelurahan 8 ulu yang masyarakatnya banyak yang mengeluh dengan kebijakan tersebut, penelitian ini juga belum pernah saya temukan tentang keadaan di kelurahan 8 ulu dan referensi juga banyak ditemukan seperti di jurnal, buku, internet tentang kebijakan pemerintah dan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia dengan cara melakukan wawancara langsung ke beberapa warga kelurahan 8 ulu seperti bapak Marwansyah, medi, Ibu Leni, Bapak Irawan dan nama-nama kepala lembaga yang ikut serta diwawancarai oleh peneliti seperti Ibu Dian Anggraini (Rt 32), bapak Reza Fahlevi (Rt 33), Fadhil iwan (Rt 34), Nasmin Suheri (Rw 05) serta kepala lurah Kelurahan 8 ulu Bapak Indra Cahya dengan menggunakan metode sosiologi politik pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis akan mengajukan penelitian yang berjudul **“PARTISPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKANPEMERINTAH DI INDONESIA (STUDI KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN JAKABARING)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat kelurahan 8 ulu terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kelurahan 8 ulu terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu arah atau target yang bakal dituju seorang peneliti dalam penelitiannya. Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia (Studi Masyarakat Di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring).
2. Untuk membuktikan hubungan partisipasi politik dan kebijakan pemerintah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan dan jawaban dari permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015 : 9). Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang penulis cantumkan yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan pengetahuan masyarakat pentingnya suatu partisipasi politik dalam kebijakan pemerintah di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dimanfaatkan masyarakat serta pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat seperti kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan membuat masyarakat menderita.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah bahan karya ilmiah yang diambil dari skripsi, jurnal dan penelitian lainnya yang membahas tentang topik yang akan diteliti. Adanya tinjauan pustaka ini dapat membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik dari penelitian sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk dapat melakukan observasi dan analisa nilai tambah dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. (J. R. Raco, 2010, : 104) Penulis mengambil pengetahuan dari berbagai karya ilmiah yang membahas tentang partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia khususnya pada masyarakat di Kelurahan 8 ulu kecamatan Jakabaring. Adapun tinjauan pustaka penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, dalam buku Dasar-dasar ilmu politik pada halaman 367-392, membahas dalam hal partisipasi politik yang memfokuskan pada partai politik, namun seiring berkembangnya demokrasi banyak yang ingin

mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan publik. masyarakat kecewa dengan kinerja partai politik dan hanya fokus pada satu isu tertentu, berharap dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara lebih efektif. Buku ini membahas tentang partisipasi politik di negara demokrasi, partisipasi politik di negara otoriter, partisipasi politik di negara berkembang, partisipasi politik melalui gerakan sosial baru dan kelompok kepentingan seperti anomi, non-asosiasi, kelembagaan, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. (Miriam Budiardjo, 2017 : 367 – 392)

Kedua, di dalam buku pengantar sosiologi politik pada halaman 147-157 yang membahas partisipasi politik. Buku ini membahas tentang partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Partisipasi politik adalah usaha terorganisir oleh masyarakat untuk memilih pemimpin yang mempengaruhi bentuk dan kebijakan umum didalam buku ini menjelaskan bahwa terdapat masyarakat atau kelompok-kelompok yang bersikap apatis terhadap urusan politik dan ada juga kelompok - kelompok yang melakukan kekerasan politik. Buku ini juga membahas tentang bentuk – bentuk partisipasi politik, luasnya partisipasi politik, siapa yang berpartisipasi dan mengapa mereka berpartisipasi. (Rafael Raga Maran, 2007 : 147-157)

Ketiga, karya ilmiah Jefri Mahyudin dalam penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokrasi (Study Kasus Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di lokasi penelitian

berpartisipasi dalam politik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang proses demokrasi dan partisipasi politik masyarakat terhadap pilkades serta konflik yang terjadi yaitu proses penetapan calon kepala desa, masa kampanye dan proses pemilihan , penetapan pemenang pilkades di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, angket dan wawancara. Metode analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. (Jefri Mahyudin, 2013 : 3)

Keempat, karya ilmiah Nursyamsi dengan judul penelitiannya Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam. penelitian ini menggunakan jenis penelitian *feed kualitatif research* dan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar adalah bentuk konvensional seperti pemberian hak suara dan kampanye dan faktor pendukung masyarakat dalam memberikan partisipasi politik adalah antusiasme, media sosial dan peran kandidat sedangkan faktor penghalang masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2019 yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menyalurkan partisipasinya dalam pemberian hak suara. Selanjutnya yaitu perspektif ketatanegaraan islam terhadap partisipasi politik

masyarakat Desa Pattopakang yaitu seluruh umat Islam wajib turut serta dan menaati para pemimpin yang ditunjuk, dipilih, dan diangkat selama pemerintah memberikan kepemimpinan yang sesuai dengan syarat dan ajaran agama. (Nursyamsi, 2020 : 16)

Kelima, penelitian sebelumnya tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, oleh Primandha Sukma Nur Wardhani. Pemilihan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersifat langsung, universal, bebas, rahasia, dan adil. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator terselenggaranya kekuasaan negara tertinggi, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui partisipasi dalam partai politik demokrasi (pemilu). Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai alat demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil dan pemimpin yang ambisius, kompeten dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diperhatikan dan dikaji lebih lanjut adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilu. (Primandha Sukma Nur Wardhani, 2018 : 57)

Keenam, penelitian sebelumnya tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar, oleh Ni Ketut Arniti. Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2014 di Denpasar. Partisipasi sangat penting untuk dipelajari karena keberhasilan pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi

masyarakatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Denpasar Tahun 2014-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan peta partisipasi dalam pemilihan umum parlemen dan presiden kota Denpasar mengalami peningkatan dan penurunan dan upaya penyuluhan partisipasi politik yang merupakan bagian terpenting dari pemilihan umum. Ketiga, kedekatan emosional calon dalam pemilihan parlemen dan presiden juga mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. (Ni Ketut Arniti, 2020 : 329)

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian agar dapat melancarkan proses pelaksanaan penelitian, peneliti harus membentuk kerangka akademis terlebih dahulu yang memusatkan perhatian dalam masalah partisipasi politik yang dimana masyarakat ikut andil dalam kegiatan politik secara langsung Adapun masalah-masalah yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik

Partisipasi dalam konteks politik berarti partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat dipahami sebagai suatu proses warga berpartisipasi dalam semua tahapan politik mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan termasuk kesempatan

untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik yang luas merupakan ciri modernisasi politik. Konsep partisipasi politik telah digunakan dalam beberapa pengertian dalam kaitannya dengan perilaku, sikap dan persepsi yang menjadi prasyarat partisipasi politik. (Sahran Raden, dkk, 2019 : 16)

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan publik dalam arti seluas-luasnya, baik dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung yang tergambar dalam berbagai dimensi kehidupan publik. Sehingga, kebijakan pemerintah disebut juga dengan kebijakan publik. Politik adalah suatu pilihan dan kehendak untuk melakukan atau tidak yang dinyatakan atas dasar kewenangan untuk mengatur dan memaksakan. Pilihan penguasa tersebut berkaitan dengan konsep pemerintahan yang memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memiliki arti sebagai kebijakan negara yaitu apabila pemerintah yang melaksanakannya akan diarahkan kepada pemerintah negara. Jika kebijakan pemerintah berarti usul-usul yang layak (diatur), objeknya bersifat publik tidak hanya dari sudut pandang negara tetapi juga dari sudut pandang masyarakat dan kepentingan umum, maka kebijakan pemerintah dapat digolongkan ke dalam kebijakan publik. (Faried Ali dan Andi Alam Syamsu, 2012 : 1)

3. Demokrasi

Demokrasi adalah rencana kelembagaan untuk pengambilan keputusan politik dimana individu diberi kekuasaan untuk memutuskan

bagaimana memperjuangkan persaingan untuk suara rakyat selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan yang penting pemerintah secara langsung atau tidak langsung berdasarkan suara terbanyak kesepakatan mayoritas diberikan secara independen. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak sama dengan di negara lain karena pelaksanaan demokrasi di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ideologi, latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan lain-lain. (Budi Juliardi, 2020 : 82)

4. Demonstrasi

Protes sangat erat kaitannya dimana protes di negara-negara demokrasi merupakan bagian dari kebebasan berbicara dan berekspresi. Di sisi lain, protes juga bisa menjadi tanda matinya demokrasi itu sendiri. Minimnya ruang partisipasi publik dalam aspek-aspek pemerintahan membuat masyarakat stress untuk mencari cara agar suaranya didengar. Abraham Lincoln (1863) berpendapat bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sama dengan Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa demokrasi berasal dari kata rakyat berkuasa atau *government or rule by the people* (Akbar Idil, 2016 : 109). Rakyat memiliki peran dalam pemerintahan bukan sekedar menerima keadaan secara pasif. Keadaan yang merugikan atau melanggar hak-hak memaksa menggunakan kekuatannya untuk bereaksi terhadap pemerintah.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah sosiologi politik. Pada penelitian ini menjelaskan hubungan antara pemerintah, politik dan masyarakat. Menurut Kolkori menjelaskan bahwa sosiologi politik yaitu studi yang khusus memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan kekuasaan yang ada di lembaga sosial dan menurut Rush dan Ahoff sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dan politik, hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada dalam tatanan sosial. (Amelia Haryanti, 2022 : 13)

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data-data yang terkumpul seperti gambar dan kata-kata dari kejadian dan peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda dan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak berpedoman pada teori, melainkan fakta yang ditemukan dalam penelitian lapangan. (Zuchri Abdussamad, 2021: 30)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nasution (1992:12) mengemukakan penelitian kualitatif adalah mengamati orang di lingkungannya, berinteraksi dengan

masyarakat dan memahami bahasa mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia. (Ajat Rukajat, 2018 : 1)

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring dan waktu yang digunakan dalam penelitian dapat menyesuaikan.

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah pengamatan langsung ke Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring dan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti akan mewawancarai beberapa warga di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring seperti ketua Lurah, ketua Rw dan ketua Rt serta warga yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari data primer ini akan kita dapatkan informasi utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber dari literasi kepustakaan yang memiliki kaitan tema dengan permasalahan dari penelitian ini seperti dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, internet atau hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Sehingga dari literasi kepustakaan tersebut dapat mendukung argument

yang penulis hasilkan dari penelitian lapangan nantinya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan, peristiwa, fakta dan realita (J. R. Raco, 2010 : 116). Adapun dalam wawancara ini penulis menemui langsung informan dari Kelurahan 8 ulu Kecamatan Jakabaring.

2. Studi literatur

Studi literature merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk menilai hasil lapangan, mencatat hasil wawancara dan proses penelitian dan penulis menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami.

Ada lima tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang dilakukan pada proses reduksi data atau analisis data. Penulis memilih dan menyusun informasi yang diperoleh dari hasil

wawancara dan dokumentasi.

- b. Penyajian data yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan data yang didapat dengan jelas dan benar.
- c. Membuat dan menyusun laporan hasil penelitian dengan benar dari hasil yang didapat di lapangan.
- d. Menarik kesimpulan dari data analisis yang diperoleh dari jumlah partisipasi politik masyarakat Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia.
- e. Sistematika dalam penulisan

H. Sistematika Penelitian

Urutan pembahasan dalam penelitian ini dibagi pada tiga bagian utama yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, berisi tentang kajian teori, dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian dan dijelaskan mengenai partisipasi politik, kebijakan pemerintah, demokrasi dan demonstrasi yang menjadi dalam penulisan yang diambil dari banyak sumber. Penulisan huruf angka atau huruf ditulis dengan teratur dan

berurutan contohnya A sub bab, A1,A2 sub-sub bab dan B sub bab, B1,B2 sub-sub bab.

Bab III, menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi dan objek penelitian. Pada bab ini akan mengenal dan memahami profil kelurahan 8 ulu kecamatan jakabaring letak geografis, sejarah berdirinya dan strukturnya.

Bab IV, dalam bab ini dijelaskan mengenai dari rumusan masalah seberapa banyak masyarakat dalam ikut berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia dan ditulis data berdasarkan hasil survei di lapangan dan selanjutnya dianalisis.

Bab V, dalam bab ini terdapat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan yang telah didapatkan dengan saran yang disampaikan oleh penulis.